

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL  
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN  
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI  
DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA PALEMBANG**

**Oleh:**

**Siti Asiyah**

Mahasiswi Program Studi Administrasi Negara S-1, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi  
Satya Negara, siti.asiyah056@gmail.com

---

**ABSTRACT**

*Siti Asiyah, 2024, Thesis title, Implementation of National Archives Regulation Number 4 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of an Integrated Dynamic Archival Information System at the Palembang City Library and Archives Service, Department of State Administration at the State College of Administrative Sciences Satya Negara Palembang. Main Supervisor (I) M.Sattarudin, S.Sos, M.Si and Associate Supervisor (II) Hj. HeldaFitriani, S.P.d., M.Sc.*

*The problem in this study is that there are not enough Human Resources according to the needs of those who understand the Srikandi application because each operator must have a letter of assignment in their respective fields issued by the head of the library and archives service, there should be 4 people who are operators but currently there are only 2 people who are operators. There are already facilities and infrastructure, but superfacilities such as the network are sometimes down from the center of the Ministry of Communication and Information and there is no availability of incoming mail notification notifications on the Srikandi application for incoming mail notifications so that operators must check periodically, besides that the Srikandi application is also useful for reducing paper use, as well as making it easier for users to be more effective and efficient in the process of archiving and searching for documents. The research procedure used by the author is a qualitative method that is descriptive, which has two concepts, namely policy implementation and general understanding in the implementation of the Integrated Dynamic Archive Information System. With data collection techniques by means of observation, literature study, interviews and documentation.*

*Based on the results of data analysis strengthened by observations and interviews, the author can draw the conclusion that the Implementation of the Regulation of the Head of the National Archives of the Republic of Indonesia Number 4 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of the Integrated Dynamic Archival Information System at the Palembang City Library and Archives Service has been running well in accordance with existing operational standards, even though it is not optimal.*

**Keywords: Policy Implementation and Integrated Dynamic Archive Information System**

**ABSTRAK**

**Siti Asiyah** 2024, Judul skripsi, Implementasi Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Palembang, jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Satya Negara Palembang. Pembimbing Utama(I) M.Sattarudin,S.Sos,M.Si dan Pembimbing Pendamping (II) Hj. HeldaFitriani, S.P.d.,M.Si.

Permasalahan dalam penelitian ini terdapat belum tercukupi Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan yang memahami aplikasi Srikandi dikarenakan setiap operator harus mempunyai surat tugas dibidang masing-masing yang dikeluarkan oleh kepala dinas perpustakaan dan kearsipan, seharusnya ada 4 orang yang menjadi operator akan tetapi saat ini hanya ada 2 orang yang menjadi operator. Sudah adanya sarana dan prasarana tetapi suprasarana seperti jaringan kadangkala down dari pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika dan belum tersedianya notifikasi pemberitahuan surat masuk pada aplikasi Srikandi untuk pemberitahuan surat masuk sehingga operator harus

mengecek secara berkala, selain itu aplikasi Srikandi juga bermanfaat untuk mengurangi penggunaan kertas, serta mempermudah pengguna lebih efektif dan efisien dalam proses pengarsipan dan pencarian dokumen- dokumen. Adapun prosedur penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yang mana memiliki dua konsep yaitu implementasi kebijakan dan pengertian umum dalam penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, studi pustaka, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperkuat dengan observasi dan wawancara, maka ditemukan adanya permasalahan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan standar operasional yang ada, walaupun belum optimal.

## **Kata Kunci : Implementasi kebijakan dan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi**

### **1. Latar Belakang**

Dengan segala manfaatnya, penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip-arsip dalam sebuah organisasi dan instansi. Srikandi merupakan salah satu aplikasi pengelolaan arsip berbasis digital dalam kategori kegiatan pengarsipan otomatis. Menggunakan Srikandi sangat berguna untuk menangani arsip dinamis, meskipun tidak mengetahui nomor utama hingga desentralisasi. Srikandi dapat mempermudah pengelolaan arsip dinamis aktif. Pengarsipan aktif adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman dan penerimaan email, sehingga ada prosedur untuk memindai karakter dan memasukkan data sesuai dengan nomor yang ada.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang adalah satu dari sekian banyak instansi pemerintah yang didedikasikan untuk pengelolaan arsip daerah. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Palembang merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi atas pelayanan perpustakaan dan kearsipan kepada masyarakat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang juga lembaga yang telah mengelola kearsipan dengan aplikasi Srikandi.

Dari hasil wawancara penulis dengan operator arsiparis pengelolaan dan penggunaan aplikasi Srikandi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang sendiri telah dilaksanakan sejak 2022, aplikasi Srikandi sendiri hasil kolaborasi antara ANRI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). “Aplikasi Srikandi ini upaya pemerintah meningkatkan kinerja, produktivitas, efektivitas, untuk mempermudah

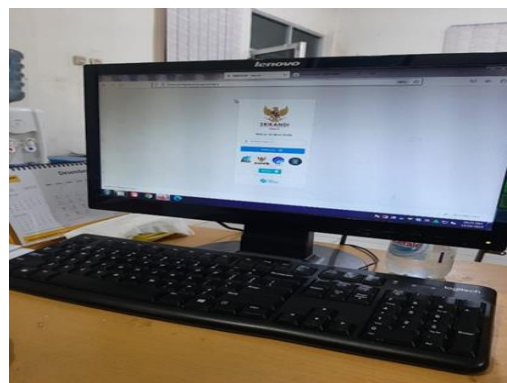
pekerjaan serta bermanfaat dalam mewujudkan pengelolaan arsip yang baik dan profesional.

Berdasarkan observasi sementara pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 terdapat indikasi masih ada ditemukannya kendala di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang yaitu sebagai berikut.

1. Belum tercukupi Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan yang memahami aplikasi Srikandi dikarenakan setiap operator harus mempunyai surat tugas dibidang masing-masing yang dikeluarkan oleh kepala dinas perpustakaan dan kearsipan, seharusnya ada 4 orang yang menjadi operator akan tetapi saat ini hanya ada 2 orang yang menjadi operator.
2. Sudah adanya sarana dan prasarana tetapi suprasarana seperti jaringan kadangkala down dari pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3. Belum tersedianya notifikasi pemberitahuan surat masuk pada aplikasi Srikandi untuk pemberitahuan surat masuk sehingga operator harus mengecek secara berkala.

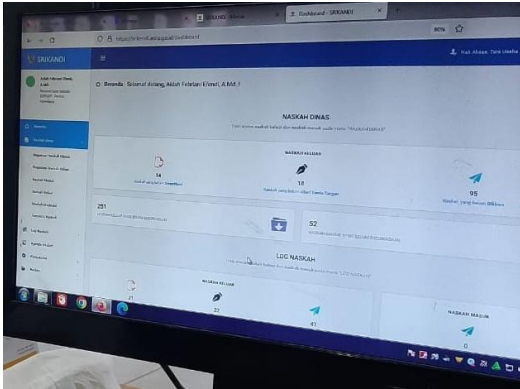
Gambar 1

Fitur Beranda Saat Arsiparis Login Masuk



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang, Tahun 2023

Gambar 2  
Fitur Menu Aplikasi Srikandi



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang, Tahun 2023

## 2. Landasan Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi ini tidak hanya aktivitas tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Usman (2009:295), menjelaskan makna dari implementasi yaitu sebagai berikut. "Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari undang-undang daerah, menyiapkan sumberdaya guna menggerakkan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan sumber daya manusia yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, untuk mengantarkan kebijakan tersebut secara konkrit ke masyarakat

### Penerapan Implementasi

Penerapan Implementasi menurut Susilo (2007:201) adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Adapun maksud dan tujuan implementasi adalah sebagai berikut.

### Maksud Implementasi Kebijakan

Maksud mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984:9), implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan.

### Tujuan Implementasi

Tujuan Implementasi menurut Edwards III(1984:11) implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Mengacu pada pengertian implementasi tersebut, adapun beberapa tujuan implementasi adalah sebagai berikut.

- Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
- Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
- Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
- Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
- Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

### Indikator Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan Terdapat 4(empat) Indikator yaitu sebagai berikut.

1. Komunikasi

2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Stuktur Birokras

### **Kerangka Berpikir**

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011:60) mengemukakan bahwa “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka pikir adalah sebuah pemahaman yang paling melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.”

Adapun kerangka berpikir Implementasi Kebijakan menurut George C.Edwards III (2002:126) yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Sedangkan Kerangka berpikir Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 yaitu.

1. Pengertian Umum Dalam Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.
- 2.Indikator Penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi
- 3.Penerapan Sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi

### **3.Prosedur Penelitian**

#### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan Kualitatif adalah penelitian yang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dengan penelitian kualitatif. Dengan demikian melalui butir-butir rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka penulisan ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif sesuai fakta di lapangan.

#### **Definisi Konsep**

Pada judul penelitian ini terdiri dari dua konsep yaitu Implementasi Kebijakan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan mencapai tujuan kegiatan. Usman (2002 : 70), dan Sistem

Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi adalah serangkaian petunjuk penerapan sistem informasi kearsipan dinamis berbasis elektronik dalam sistem pemerintahan yang terintegrasi, digunakan oleh lembaga negara atau pemerintah daerah. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 pasal 1.

#### **Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena (Nursalam, 2014).

Konsep Implementasi Kebijakan menurut (George C. Edwards III 2002 : 126)

terdiri dari 1. Komunikasi

2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Sedangkan konsep dalam penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, menurut (Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021) terdiri dari

1. Sumber Daya
2. Tahapan Penerapan
- 3.Integrasi Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elekonik.

#### **Informan Penelitian**

Informan menurut Sugiono, (2016:54) adalah informan atau narasumber dalam penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi maupun data yang banyak terkait masalah dan objek yang sedang diteliti sehingga nantinya akan diminta informasi mengenai objek penelitian tersebut terdiri dari pegawai-pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang. Dengan informan sebanyak 5(lima) orang yaitu sebagai berikut.

- 1.Arlina Dinasari,S.STP.,M.Si, Jabatan sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Layanan dan Pemanfaatan Arsip
- 2.Nova Anggraini, S.AB, Jabatan sebagai Arsiparis Terampil Mahir
- 3.Aidah Febrianti. E, A.Md, Jabatan sebagai Arsiparis Terampil
- 4.Tri Nopriyanti, SH, Jabatan sebagai Arsiparis Ahli Muda
- 5.Neni Indayanti, S.IP Jabatan sebagai Penyuluh Kearsipan

#### **Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

1. Observasi

2. Wawancara
3. Dokumentasi
4. Studi pustaka

### **Teknik Analisa Data**

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2007 : 333).

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan penelitian sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007: 204) yaitu.

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data langkah
4. Verifikasi penarikan kesimpulan

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Implementasi**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan model Implementasi yang dikembangkan oleh George Edwards III sebagai alat analisis, yaitu.

#### **a. Komunikasi**

Menurut Turner (2008:5) “komunikasi adalah proses sosial dimana individu- individu menggunakan simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka.”

Berdasarkan hasil wawancara yang diketahui bahwa suatu komunikasi yang terkait Implementasi Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang sudah dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini penyampaian informasi mengenai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan alurnya dimulai dari sosialisasi dan bimtek dari tim arsip Nasional Republik Indonesia dan selanjutnya disosialisasikan kepada pegawai terkait dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang. Dan dilanjutkan dengan melakukan komunikasi antar pegawai yang satu dengan yang lainnya dalam bentuk formal dan non formal seperti perintah langsung atasan terhadap bawahannya.

#### **2. Sumber Daya**

Menurut George C.Edward III dalam Indiahono (2009:31-32), suatu sumber-sumber penting yang telah mendukung implementasi

kebijakan yang meliputi staff yang telah memiliki keahlian yang sesuai untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang serta fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang dalam melaksanakan sebuah kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian dari observasi maka diketahui Sumber Daya Manusia (SDM) dan suprasarana dikantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Yang mana bahwa ketersediaan Sumber Daya Manusia(SDM) dalam suatu hal pelaksanaan peraturan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang yang khusus untuk mengelola sebuah arsip masih kurang selama ini yang mengelola arsip hanyalah staf yang biasa dari masing-masing bagian, dikarenakan setiap operator harus mempunyai surat tugas dibidang masing-masing yang dikeluarkan oleh kepala dinas perpustakaan dan kearsipan, yang mana seharusnya ada 4 orang yang menjadi operator akan tetapi saat ini hanya ada 2 orang yang menjadi operator. Selanjutnya untuk sarana dan prasarana sudah ada tetapi suprasarana seperti jaringan kadangkala down dari pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan belum tersedianya notifikasi pemberitahuan surat masuk pada aplikasi Srikandi untuk pemberitahuan surat masuk sehingga operator harus mengecek secara berkala.

#### **3. Disposisi**

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) mengatakan bahwa sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang telah menjadi tujuan suatu kebijakan dapat diwujudkan.

Berdasarkan dari hasil penelitian dari observasi bahwa disposisi pegawai dikantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang dalam penerimaan peraturan sesuai dengan tata urutan dan struktur yang berlaku. Hal ini telah terbukti dengan adanya mematuhi aturan-aturan yang ada dari semua pegawai yang menerima dan mematuhi ketentuan peraturan yang ada.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Menurut Edward III dalam nugroho (2010:104) yang menjelaskan bahwa struktur birokrasi telah berkenan dengan kesesuaian organisasi suatu struktur birokrasi yang menjadi penyelenggara suatu implementasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil observasi bahwa sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia dan para pelaksana

kebijakan telah mengetahui apa yang harusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan peraturan sudah terlaksana dengan baik.

#### 5. Sumber Daya

Sumber Daya dalam rangka menerapkan SRIKANDI diperlukan sebagai sumber daya kearsipan yang memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya. Sumber Daya yang dibutuhkan sebagai persyaratan untuk menerapkan Srikandi terdiri dari Infrastruktur dan Suprastruktur.

Berdasarkan hasil wawancara, pada staf di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang terjadi belum maksimal baik, dikarenakan aplikasi tidak bisa digunakan apabila sedang pergantian versi dan harus rutin cek secara berkala surat masuk dikarenakan tidak ada notifikasi.

#### 6. Tahapan Penerapan

Tahapan penerapan menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 terdiri dari dukungan pimpinan yang mana atasan dan pimpinan mendorong pekerjaan, inovasi, meningkatkan keterampilan dan memberikan pengakuan kepada pegawai untuk mendukung penggunaan Sistem dan fasilitas Penerapan Kearsipan Dinamis Terintegrasi serta memiliki fasilitas dalam Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang dapat mendukung penggunaan teknologi atau sistem misalnya pelatihan pengguna dan bimbingan konsultasi. Serta dalam rangka menjamin terselenggaranya penerapan Srikandi dilingkungan Lembaga Negara Dan Pemerintah Daerah, Arsip Nasional Republik Indonesia melaksanakan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur pemanfaatan Srikandi dalam pengelolaan Arsip Dinamis Berbasis Elektronik agar dapat dikembangkan ke arah kesempurnaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi.

Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan penerapan pelaksanaan implementasi Srikandi Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Palembang sudah cukup baik, yang mana berupa pelatihan, sosialisasi dan BIMTEK, untuk mempermudah staf kedepannya agar efektif dan efisien serta untuk pelatihan secara mandiri dapat di akses pada laman kearsipan.layanan.go.id; sedangkan untuk implementasi dapat di akses pada laman arsip.go.id.

#### 7. Integrasi Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Integrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 yaitu pada intinya adalah pengelolaan informasi dan arsip, oleh karena itu kegiatan pemerintahan akan bermuara pada terciptanya arsip yang dikelola oleh pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Yang mana dikembangkan secara bertahap untuk dapat diintegrasikan dengan aplikasi umum lainnya yang digunakan oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, agar penciptaan arsip/ informasi dapat terjamin keutuhan dan keterpercayaannya. Serta membantu meningkatkan efisiensi operasional, responsif terhadap kebutuhan pengguna, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang tersedia.

Berdasarkan hasil jawaban informan wawancara yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa, pelatihan atau bimbingan dalam penggunaan aplikasi Srikandi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang, dilaksanakan dengan baik terbukti sudah melakukan sosialisasi, pelatihan dan BIMTEK yang mana diikuti oleh dinas arsip, kominfo, dan bagian organisasi Setda yang dilaksanakan di Jakarta untuk pelatihan Tim Kota serta untuk perangkat daerah Sekota Palembang dilaksanakan sosialisasi di Palembang. Untuk menunjang perkembangan staf dalam pengelolaan arsip agar lebih efektif dan efisien.

#### **2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang sebagai berikut.**

a. Faktor pendukung dalam Implementasi Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang diantaranya yaitu mendapat dukungan dari pemimpin berupa pelatihan, sosialisasi, dan BIMTEK. Serta dalam hal komunikasinya baik dan lancar antar pegawai yang satu dengan yang lainnya atau antar bagian bidang baik secara formal maupun non formal.

b. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis

Terintegrasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang diantaranya yaitu keterbatasan sumber daya manusia serta suprasarana yang belum memadai untuk pengelolaan kearsipan dengan baik.

Kemudian hasil pengamatan yang telah didapat dari beberapa informan diatas bahwa Implementasi Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang belum sesuai dengan teori dan kenyataan dilapangan.

## **5. Simpulan dan Saran**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan bila dilihat dari indikator yaitu komunikasi, sumber daya, Disposisi, Struktur birokrasi, Tahapan Penerapan, dan Integrasi Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang sudah dilaksanakan namun belum optimal.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1.Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) maka hal ini harus mengeluarkan surat tugas kepada pegawai khususnya bidang kearsipan sesuai kebutuhan bidang masing-masing, karena sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi yang telah dibuat. Selain Sumber Daya Manusia juga diperlukan Sumber daya penunjang guna mendukung kemampuan sumber daya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang.

2.Memberikan pelatihan atau bimbingan kepada pegawai seperti Bimbingan Teknologi (BIMTEK) dan sosialisasi sebelum memulai kerja agar lebih baik lagi dalam menunjang perkembangan staf pada pengolaan arsip agar lebih efektif dan efisien. Serta dalam hal komunikasinya yang sudah baik dan lancar antar pegawai yang satu dengan yang lainnya atau antar bagian bidang baik secara formal maupun non formal lebih dipertahankan agar tidak miskomunikasi kedepanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino. 2006:144. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cetakan ke-6. Bandung. Alfabeta.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang : “Widya Karya”Semarang.
- Hessel Nogi S, Tangkilisan. 2001. *Buku Implementasi Kebijakan Publik* (hlm 1 – 127). Yogyakarta : Lukman Offset.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisa*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Subarsono. 2015 : 93. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, Aplikasi)*. Cetakan ke-6. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (x)*. Alfabeta.
- Supardi, dkk. 2023. *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi*. Palembang : STIA Satya Negara Palembang
- Syahrudin. 2020. *Buku Implementasi Kebijakan Publik* (hlm 33 – 65). Bandung : Nusa Media
- Wahab, Solichin Abdul, 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta.
- Sumber Jurnal :**
- Ayang Adra, Iip Permana. 2023. *Pemanfaatan aplikasi SRIKANDI bagi pegawai di pusat pengembangan sumber daya manusia regional bukit tinggi*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2(1) : (1-12).
- Milenia, Harapan Tua RFS. 2023. *Efektivitas Pelayanan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(15) : (403-408)
- Ritonga, Abrizalhasan. 2023. *Implementasi Kebijakan Aplikasi SRIKANDI Dalam Pengelolaan Arsip Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatra Utara*. Disertasi tidak

diterbitkan. Program Studi Kebijakan  
Publik Sumatra Utara.

**Sumber Lain :**

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia  
Nomor 4 Tahun 2021 Tentang  
Pedoman Penerapan Sistem Informasi  
Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Di  
Lingkungan Pemerintah Kota  
Palembang. 2021. Jakarta : Peraturan  
Kepala Arsip Nasional Republik  
Indonesia